



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 12 Mei 2017

Halaman: 2

PILWALI YOGYA TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

3 PPK Tak Terbukti Langgar Kode Etik

YOGYA (KR) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing di Danurejan, Umbulharjo dan Gondokusuman, tidak terbukti melanggar kode etik. Dengan begitu, penyelenggaraan Pilwali Yogya sudah dijamin berjalan secara transparan dan profesional.

Putusan DKPP tersebut merupakan tindak lanjut dari aduan yang disampaikan Panwas Kota Yogya. Dalam aduannya, Panwas menduga ada pelanggaran kode etik lantaran ketiga PPK itu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwascam setempat saat proses rekaptulasi suara tingkat kecamatan. Rekomendasi Panwascam saat itu ialah membuka surat suara tidak sah.

"Sebelum sampai pada putusan, kami sudah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap bukti-bukti dari pengadu serta klarifikasi kepada teradu dan pihak terkait. Putusan ini bersifat final dan harus dijalankan guna menegakkan kehormatan penyelenggara pemilu," urai Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie ketika membuka rapat pleno pembacaan putusan yang disiarkan melalui *video conference* di Bawaslu DIY, Rabu (10/5).

Putusan ketiga PPK itu dibacakan secara berurutan oleh anggota DKPP. Dalam kesimpulannya, ketiga PPK tidak terbukti melanggar kode etik. Justru, Panwascam dalam memberikan rekomendasi dinilai berdasarkan asumsi serta tidak merujuk aturan yang berlaku. Sesuai aturan, kotak suara dapat dibuka manakala terjadi perselisihan data perolehan suara serta adanya keberatan dari saksi di TPS.

Selain memutuskan ketiga PPK tidak melanggar kode etik, DKPP meminta kepada Panwas agar memberi pembinaan kepada jajaran supaya memahami aturan secara baik. Di samping itu, nana baik ketiga PPK juga wajib direhabilitasi karena sudah bekerja secara profesional. KPU dan Panwas Kota Yogya harus sudah menindaklanjuti putusan DKPP tersebut paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Ketua KPU Kota Yogya Wawan Budiyanto mengapresiasi keputusan akhir DKPP tersebut. Menurutnya, sejak awal KPU meyakini rekan penyelenggara di bawahnya sudah bekerja secara profesional dan sesuai aturan yang ada. "Kita harus menghormati setiap proses dan hasilnya. Termasuk persidangan di DKPP untuk menjaga kehormatan pemilu," tandasnya saat memantau melalui *video conference*.

Sementara Ketua Panwas Kota Yogya Agus Muhammad Yasin mengaku menerima dengan lapang seluruh putusan DKPP. Kendati seluruh aduannya tidak terbukti, namun upaya yang ditempuh merupakan bagian dalam menegakkan kehormatan Pilwali. Hasil akhir itu pun menjadi evaluasi serius bagi jajaran Panwas dalam memberikan pemahaman yang utuh mengenai regulasi kepada bawahannya. (Dhi)-d



KR-Andri Wahdan
Jajaran PPK dan KPU salam komando usai diputus tidak melanggar kode etik oleh DKPP.

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Karta,
Plt. Kepala
Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005